



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 2 Februari 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.40 WIB s.d 14.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010; 2. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2010; 3. Strategi dan metodologi pengawasan kegiatan tahun 2011; 4. Evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN 2011
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini adalah membahas mengenai potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010; potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010; *reward* dan *punishment* terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2010; strategi dan metodologi pengawasan kegiatan tahun 2011; serta evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN 2011.
3. Ketua mempersilakan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Sehubungan realisasi keuangan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 88,43% dari pagu DIPA Kementerian Pekerjaan Umum T.A. 2010 sebesar Rp 37,772 Trilyun, meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan analisa terhadap rendahnya penyerapan anggaran tersebut bila dibandingkan dengan TA 2009 dan menyampaikan hasil analisa tersebut kepada Komisi V DPR RI.
2. Meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan data kepada Komisi V DPR RI seluruh program/kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya serta seluruh program/kegiatan yang sudah selesai tetapi belum berfungsi sesuai tujuannya.
3. Meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan audit terhadap seluruh pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, tetapi belum berfungsi sesuai tujuannya dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
4. Meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi terhadap penyedia dan pengguna jasa yang lebih kuantitatif dan menyeluruh, serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Komisi V DPR RI agar diperoleh potret pelaksanaan dan kemampuan pelaksana yang sesungguhnya.
5. Meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dimenangkan oleh penyedia jasa dibawah 80% harga *Owner Estimated (OE)*, dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
6. Komisi V DPR RI mendukung Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengawasan untuk bertindak independen dan tegas sejak penyusunan program sehingga pelaksanaan APBN 2011 akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
7. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaporkan sisa anggaran tender Tahun Anggaran 2010 dan pada periode Tahun Anggaran 2011 bila terdapat sisa anggaran, maka penggunaannya harus dibahas kembali dalam Rapat Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

ttd

DR. IR. M. BASOEKI HADIMOELJONO, MSC

Jakarta, 2 Februari 2011

KETUA RAPAT,

ttd

IR. H. MULYADI

1. Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi atas telah terselesaikannya 13 PP yang diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyelesaian 9 Raperpres, 13 Draft Permen PU dan peraturan turunan lainnya demi terciptanya aturan hukum yang tegas dan jelas di bidang penataan ruang.

Jakarta, 31 Januari 2011,
KETUA RAPAT,

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 21 September 2010

KETUA RAPAT,

IR. H. MULYADI

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT**

K E T U A,

IR. A. HELMY FAISHAL ZAINI, SE

SOEHARSO MONOARFA, MA

.....

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**KEPALA BADAN
SAR NASIONAL,**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO,**

DR. IR. SRI WORO B. HARIJONO, MSC

MARSDYA. WARDJOKO

SOENARSO

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. SOEROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA,

SUNARYO, SH

IR. HARRY BAKTI SINGAYUDA, MM

DIRJEN BINA MARGA,

DIRLANTAS MABES POLRI,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSi

MARSDYA. WARDJOKO

